

## Gambaran Umum Kondisi Daerah

### 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

#### 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada  $0^{\circ}45'-2^{\circ}45'$  LS dan  $101^{\circ}10'-104^{\circ}55'$  BT di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*).

Disamping itu, peluang Jambi kedepan dengan adanya pembukaan Terusan Thai (sebelumnya disebut Terusan Kra atau Terusan tanah genting Kra) yaitu terusan yang akan melewati Thailand Selatan untuk mempersingkat transportasi di wilayah tersebut dan rencananya akan dibuka pada tahun 2011 akan membuka peluang baru bagi Provinsi Jambi karena posisinya yang menghadap dan terbuka langsung ke Laut Cina Selatan. Pembukaan Terusan Kra ini akan mengubah geo-ekonomi global (khususnya Asia Timur) mengingat arus transportasi laut yang selama ini melewati Selat Malaka akan langsung berubah rute pelayarannya melalui Terusan Kra. Disamping itu Pelabuhan Sabang yang berada di ujung barat Indonesia bisa menjadi kota pelabuhan yang besar. Menghadap langsung ke Laut China Selatan. Peluang lainnya adalah

rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda akan membuka aksesibilitas ke Pulau Jawa.

Secara geografis, luas wilayah Provinsi Jambi tercatat seluas 53.435,72 km<sup>2</sup> yang terdiri dari (Biro Pemerintahan dan OTDA, 2009) :

- 1) Kabupaten Kerinci 3.808,50 Km<sup>2</sup> (7,13%),
- 2) Kabupaten Bungo 6.461,00 Km<sup>2</sup> (12,09%),
- 3) Kabupaten Tebo 6.802,59 Km<sup>2</sup> (12,73%),
- 4) Kabupaten Merangin 7.451,30 Km<sup>2</sup> (13,94%),
- 5) Kabupaten Sarolangun 6.175,43 Km<sup>2</sup> (11,56%),
- 6) Kabupaten Batanghari 5.804,83 Km<sup>2</sup> (10,86%),
- 7) Kabupaten Muaro Jambi 5.246,00 Km<sup>2</sup> (9,82%),
- 8) Kabupaten Tanjab Barat 5.645,25 Km<sup>2</sup> (10,56%),
- 9) Kabupaten Tanjab Timur 5.444,98 Km<sup>2</sup> (10,19%),
- 10) Kota Jambi 205,38 Km<sup>2</sup> (0,38%).
- 11) Kota Sungai Penuh 391,5 Km<sup>2</sup> (0,73%).

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (Bappeda, 2005):

- 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
- 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan

- 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Provinsi Jambi berada di bagian tengah Pulau Sumatera memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 2.1  
**Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi**

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/ Kabupaten
	Ha	%	
1	2	3	4
Dataran Rendah (0 – 100 )	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari
Dataran sedang (100 – 500)	903.180	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tinggi (> 500)	765.655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah	5.100.000	100	

Sumber : BPS Prov. Jambi

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merang kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit. Wilayah ini didominasi oleh jenis tanah latosol dan andosol. Pada bagian tengah Kabupaten Kerinci banyak di temui jenis tanah alluvial yang subur yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan irigasi yang cukup luas. Beberapa jenis tanah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2  
**Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Provinsi Jambi**

No.	Jenis Tanah	Jumlah	%
1	2	3	4
1	Podzolik Merah Kuning	2,036,386	39.93
2	Latosol	952,386	18.67
3	Gley Humus Rendah	547,830	10.74
4	Andosol	354,406	6.95
5	Organosol	308,338	6.05
6	Podzolik Coklat + Andosol + Podzolik	275,652	5.40
7	Podzolik Merah Kuning	236,343	4.63
8	Alluvial	199,553	3.91
9	Hidromorfik Kelabu	83,743	1.64
10	Latosol Andosol	60,032	1.18
11	Rawa Laut	42,951	0.84
12	Komplek Latosol + Litosol	2,380	0.05
Jumlah .....		5,100,000	100.00

Sumber : RTRW Provinsi Jambi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis tanah yang dominan di Provinsi Jambi adalah Podzolik Merah Kuning dengan luas 2.036.386 hektar atau 39,93% dari luas wilayah sedangkan jenis tanah yang terendah adalah kompleks latosol dan litosol yaitu 2.380 hektar atau 0,05%.

Dilihat dari pola aliran sungai, dimana di daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan kecenderungan air sungai menjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai 7 (tujuh) meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang WS Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha tani.

Berdasarkan kondisi topografi, kelerengan dan kondisi hidrologi, dapat disimpulkan berbagai karakter lahan di Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a) Pertanian lahan basah (LB), luasnya 684,060 hektar atau 13,41 % dari total luas Provinsi Jambi, dengan kemiringan 0-3 % dan ketinggian 0-10 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian utara sepanjang pesisir pantai dan bagian wilayah tengah yang merupakan WS Batanghari dan sub WS nya.
- b) Pertanian lahan kering dataran rendah sampai sedang (LKDR) luasnya 2.747.105 hektar atau 53,87 % dari luas total Provinsi Jambi dengan kemiringan 3-12 % dan ketinggian 10-100 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian

selatan (Tanjung Jabung Timur), sebagian besar wilayah tengah kecuali WS (Kota Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo bagian tengah dan selatan) dan wilayah barat (Sarolangun, Merangin bagian selatan dan Kerinci bagian tengah).

- c) Pertanian lahan kering dataran tinggi (LKDT) luasnya 903.180 hektar atau 17,71 % dari total luas Provinsi Jambi dengan kemiringan 12-40 % dan ketinggian 100-500 m dpl. Umumnya terdapat di wilayah barat (seluruh Kerinci kecuali bagian tengah, Sarolangun-Merangin bagian utara dan barat serta Bungo, Tebo bagian barat dan utara). Sedangkan sisanya 15,02 % merupakan dataran tinggi dengan ketinggian di atas 500 m dpl merupakan daerah pegunungan dari rangkaian pegunungan bukit barisan yang membujur di sebelah barat wilayah Provinsi Jambi.

Berdasarkan karakter kompleks ekologi, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Tabel 2.3  
Karakter Lahan Pertanian di Provinsi Jambi

Uraian	Karakter lahan pertanian		
	LB	LKDR	LKDT
1	2	3	4
Proporsi luas Lahan	18,41 %	53,87 %	17,71 %
Kemiringan	0-3 %	3-12 %	12-40 %
Topografi	0-10 m dpl	10-100 m dpl	100-500 m dpl
Penggunaan lahan eksisting	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hutan rawa</li> <li>- Hutan bakau, nipah</li> <li>- Semak belukar</li> <li>- Sawah tanda hujan</li> <li>- Sawah pasang surut</li> <li>- Sawah irigasi</li> <li>- Kebun kelapa</li> <li>- Permukiman</li> <li>- Hutan lindung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hutan primer</li> <li>- Ladang berpindah</li> <li>- karet rakyat</li> <li>- Hultikultura</li> <li>- Sawah irigasi</li> <li>- kelapa sawit</li> <li>- Permukiman</li> <li>- Hutan lindung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hutan primer</li> <li>- Ladang berpindah</li> <li>- kayu manis</li> <li>- Hultikultura</li> <li>- Sawah irigasi</li> <li>- Semak belukar</li> <li>- Permukiman</li> <li>- Hutan lindung</li> </ul>
Upaya pemanfaatan lahan	Input teknologi menengah tinggi	Ketersediaan unsur hara	Keterbatasan lahan karena hutan lindung
Komoditi potensial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sawah pasang susut</li> <li>- Sawah tandah hujan</li> <li>- Sawah irigasi</li> <li>- Palawija, hultikultura</li> <li>- Kebun kelapa, kopi kakao</li> <li>- Perikanan laut &amp; tambak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sawah irigasi</li> <li>- Palawija</li> <li>- Hultikulture</li> <li>- Peternakan</li> <li>- Perkebunan sawit</li> <li>- Karet, kopi, kakao</li> <li>- Perikanan kolam &amp; tambak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casiavera</li> <li>- Sawah irigasi</li> <li>- Hultikultura</li> <li>- Kopi</li> <li>- Perikanan kolam</li> </ul>
Cakupan wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanjung Jabung Barat dan Timur</li> <li>- WS Batanghari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tanjab Timur</li> <li>- Kota Jambi</li> <li>- Batanghari</li> <li>- Bungo, Tebo tengah &amp; selatan</li> <li>- Sarolangun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerinci kecuali bagian tengah</li> <li>- Bungo, Tebo Barat dan Utara</li> <li>- Sarolangun utara dan barat</li> </ul>

Keterangan :

LB : Lahan Basah  
LKDR : Lahan Kering Dataran Rendah  
LKDT : Lahan Kering Dataran Tinggi

Adapun Penggunaan lahan di Provinsi Jambi secara umum terdiri dari : 1) Lahan Permukiman tercatat 43.631 Ha; 2) Sawah Tadah Hujan tercatat 136.662 Ha; 3) Tegalan/Ladang tercatat 117.516 Ha; 3) Kebun Campuran tercatat 112.787 Ha; 4) Kebun Karet tercatat 1.284.003 Ha; 5) Kebun Sawit tercatat 936.565 Ha; 6) Kebun Kulit Manis tercatat 93.609 Ha; 7) Kebun teh tercatat 4.691 Ha; 8) Semak dan alang-alang tercatat 87.177 Ha; 9) Hutan Lebat tercatat 1.634.492 Ha; 10) Hutan

Belukar tercatat 413.406 Ha; 11) Hutan Sejenis tercatat 187.704 Ha; 12) Lain-lain tercatat 47.757 Ha

### **2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Berdasar kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan) (I/B/1)
- b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi) (I/B/1)
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) (I/B/1)
- d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi) (I/B/1)

Sedangkan untuk Kawasan strategis provinsi adalah yang wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan-kawasan strategis yang berada untuk Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya



2. Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis Muaro Bungo
5. Kawasan strategis Tebo – Wirotto Agung
6. Kawasan strategis Bangko - Sarolangun – Singkut
7. Kawasan strategis Sungai Penuh dan sekitarnya

Berdasarkan penunjukkan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan yang dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, dimana kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi luas  $\pm$  2.179.440,00 Ha atau 42,73% dari keseluruhan luas Provinsi Jambi. Adapun luasan tersebut sesuai dengan pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 30.400,00 Ha (1,39%), Taman Nasional 608.630,00 Ha (27,92%), Taman Hutan Raya 36.660,00 Ha (1,68%), Hutan Wisata Alam 430,00 Ha (0,02%), Hutan Lindung 191.130,00 Ha (8,77%), Hutan Produksi Terbatas 340.700,00 Ha (15,63%), Hutan Produksi Tetap 971.490,00 Ha (44,57%).

Berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan perkembangan yang positif dimana terlihat dengan meningkatnya beberapa indikator, yaitu:

1. Sampai dengan tahun 2009, luas areal untuk komoditi perkebunan di Provinsi Jambi seluas 1.334.595 ha yang terdiri dari 5 komoditi utama perkebunan yaitu karet dengan luasan 650.623 ha (48,75 %), kelapa sawit dengan luasan 493.678 ha (36,99 %), kelapa dalam dengan luasan 118.879 ha (8,91 %), kopi dengan luasan 23.954 ha (1,79 %) dan cassiavera dengan luasan 47.461 ha (3,56 %).

Pada tahun 2006 luas perkebunan karet di Provinsi Jambi baru mencapai 630.211 ha, maka pada tahun 2009 meningkat sebesar 3,24 % menjadi 650.623 ha. Sementara untuk Karet areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) terjadi peningkatan sebesar 36,27 %, dimana pada tahun 2006 luas areal TBM adalah sebesar 128.031 ha meningkat pada tahun 2009 menjadi 174.472 ha. Untuk Tanaman Menghasilkan (TM) juga mengalami peningkatan sebesar 1,35 %, dimana pada tahun 2006 luas arealnya adalah 342.346 ha dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 346.977 ha. Sementara untuk Tanaman Tua/Tanaman Rusak (TT/TR) terjadi penurunan sebesar -19,18 %, dimana pada tahun 2006 jumlah areal TT/TR adalah 159.834 ha menurun pada tahun 2009 menjadi 129.174 ha.

2. Secara umum peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya luas areal kebun karet sebesar 3,24 % dari 630.211 ha pada tahun 2006 menjadi 650.623 ha pada tahun 2009, untuk periode yang sama juga terjadi peningkatan jumlah petani karet di Provinsi Jambi sebesar 10,16 % dimana pada tahun 2006 jumlah petani karet berjumlah 228.576 KK, maka pada tahun 2009 meningkat menjadi 251.796 KK. Sementara harga komoditi tersebut secara rata-rata juga meningkat sebesar 41,54 %, dimana pada tahun 2006 harga karet Rp. 6.436/kg meningkat menjadi Rp. 9.109,64/kg. Sementara dari sisi ekspornya, juga mengalami peningkatan sebesar 0,80 % jika dibandingkan dengan tahun 2006 berjumlah 250.781,28 ton menjadi 252.794,76 ton di tahun 2009.
3. Sampai dengan tahun 2009 luasan areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi adalah 493.678 ha atau setara

dengan 36,99 % dari total luasan perkebunan yang berjumlah 1.334.595 ha. Jika dilihat perkembangan luasan lahannya, maka telah terjadi peningkatan luasan sebesar 16,74 % dari tahun 2006 dengan luas 422.888 ha menjadi 493.678 ha pada tahun 2009. produksi Tandan Buah Segar (TBS) mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2006 menghasilkan TBS sebanyak 5.093.840 ton menjadi 6.351.540 ton pada tahun 2009. Begitu juga dengan produksi CPO mengalami peningkatan dari 1.018.768 ton pada tahun 2006 meningkat sebesar 1.270.308 ton pada tahun 2009.

4. Untuk komoditi kelapa dalam, jika dilihat dari luasan lahannya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Secara rata-rata untuk periode tahun 2006 -2009 terjadi penurunan luasan lahan dari 199.292 ha tahun 2006 menjadi 118.879 ha tahun 2009 atau turun sebesar 0,12 %. Seiring dengan penurunan luasan lahan tersebut, juga diikuti dengan penurunan produksi kopra, dari 118.886 ton tahun 2006 menjadi 113.142 tahun 2009 atau secara rata-rata untuk periode yang sama mengalami penurunan sebesar 1,59 %. Indikator lain yang mengalami penurunan adalah jumlah petani yang mengalami penurunan dari 100.147 KK tahun 2006 menjadi 95.785 KK atau turun sebesar 1,46 %. Disisi lain, untuk harga kopra secara rata-rata untuk tahun 2006 – 2009 mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan jika dibandingkan pada tahun 2006, dimana pada tahun 2009 harga kopra mencapai Rp4.627/kg atau meningkat sebesar 4,36 % jika dibandingkan dengan harga kopra pada tahun 2006 yaitu Rp1.624/kg.

5. Terhadap komoditi kopi, jika dilihat dari luasan lahannya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun dari 24.458 ha tahun 2006 menjadi 23.954 ha tahun 2009. Secara rata-rata untuk periode tahun 2006 - 2009 terjadi penurunan luasan lahan sebesar 0,69 %. Seiring dengan penurunan luasan lahan tersebut, juga diikuti dengan penurunan produksi kopi pada tahun 2007 menjadi 10.190 ton, namun secara perlahan mengalami peningkatan produksi kembali pada tahun 2008 menjadi 10.539 ton atau naik sebesar 3,42 % dan kembali meningkat di tahun 2008 yaitu sebanyak 10.934 ton atau naik sebesar 3,75 %. Indikator lain yang mengalami penurunan adalah jumlah petani yang mengalami penurunan dari 27.696 KK tahun 2006 menjadi 24.488 KK tahun 2009 atau turun sebesar 3,86 % untuk kurun waktu tahun 2006 – 2009. Disisi lain, untuk harga kopi secara rata-rata mengalami peningkatan dari Rp.8.004 per kg tahun 2006 menjadi Rp.20.494 per kg tahun 2009 atau naik sebesar 38,00 %.
6. Cassiavera merupakan salah satu komoditi perkebunan yang dapat dikategorikan komoditi unggulan daerah, dalam perkembangannya komoditi ini mengalami pasang surut. Dimana luasan arealnya secara rata-rata selama tahun 2006 – 2009 terus mengalami penyusutan dari 49.106 Ha tahun 2006 menjadi 47.461 Ha tahun 2009 atau rata-rata berkurang sebesar 1,12%, begitu juga dengan produksinya yang mengalami penurunan 64.602 ton tahun 2006 menjadi 57.526 ton tahun 2009 atau turun rata-rata sebesar 3,67 %. Sementara jika dilihat jumlah petani yang berusaha pada komoditi ini juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun dari 20.708 KK tahun 2006 menjadi 18.894

KK tahun 2009, atau terjadi penurunan jumlah petani sebesar 2,98 %, untuk harganya sendiri mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan harga untuk tahun 2007 dan tahun 2008, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2009. Secara kumulatif terjadi peningkatan harga selama kurun waktu 2006 – 2009 sebesar 10,45 %.

7. Jika dilihat lebih lanjut terhadap penanganan pertanian, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 637.757 orang meningkat menjadi 740.849 orang di tahun 2009 atau mencapai 58,22% dari jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian. Sangat tingginya penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini perlu mendapat perhatian ke depan. Hal ini sangat penting diperhatikan karena sampai pada tahun 2009 kesejahteraan petani masih jauh dari harapan karena nilai NTP masih di bawah 100. Tingkat kemampuan/daya beli petani yang dicerminkan dengan nilai tukar petani (NTP) sejak tahun 2000 dengan nilai 108,17 dan terus menurun sampai tahun 2009 hanya 98,54.
8. Terhadap luas panen dan produksi komoditi pangan, ada beberapa yang mengalami peningkatan cukup signifikan terutama produksi padi yang meningkat produksi dari 579.635 ton GKG tahun 2005 dan mencapai produksi tertinggi pada tahun 2009 yaitu 644.947 Ton GKG dengan pertumbuhan rata 2,71% per tahun. Terjadinya kenaikan produksi ini tidak terlepas dengan terjadinya peningkatan luas panen dari 154.941 Ha tahun 2005 menjadi 155.802 Ha pada tahun 2009 dengan pertumbuhan rata-rata 0,14 per tahun dan produktivitasnya juga meningkat dengan rata-rata peningkatan produktivitas 2,57% per tahun.

Sementara itu, terhadap peningkatan luas panen dan produksi tidak hanya terjadi pada produksi Padi namun juga terjadi pada komoditi lainnya seperti pada jagung yang meningkat sebesar 6,49% per tahun. Peningkatan produksi jagung ini seiring dengan peningkatan luas panen rata-rata 3,32% pertahun dan produktivitas meningkat rata-rata 3,08% per tahun, produksi kedele yang meningkat rata-rata 33,64% per tahun. Peningkatan ini diakibatkan pada terjadinya peningkatan luas panen rata-rata 38,82% pertahun walaupun produktivitasnya turun -0,87% per tahun. Produksi kentang juga meningkat menjadi 94.368 ton pada tahun 2009. Namun untuk produksi tanaman pangan lain seperti Kacang tanah mengalami penurunan sebesar -1.45% pertahun, Kacang Hijau sebesar -8,73, Ubi Kayu turun sebesar -0,27% per tahun dan Ubi Jalar turun sebesar -7,67% pertahun. Penurunan ini disebabkan karena turunkan luas panen walaupun dari segi produktivitas terjadi peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan pada produksi padi dari 544.597 ton GKG tahun 2004 dan mencapai produksi tertinggi pada tahun 2009 yaitu 644.947 Ton GKG. Selain itu, untuk komoditi lainnya seperti pada jagung yang meningkat dari 29.288 ton pada tahun 2004 menjadi 38.168 ton pada tahun 2009. Sedangkan kedele meningkat dari 2.637 ton tahun 2004 menjadi 9.132 ton tahun 2009 dan kentang meningkat dari 48.357 tahun 2004 menjadi 94.368 tahun 2009.

9. Terhadap ketersediaan beras dan jagung untuk dikonsumsi di rumah tangga telah mencukupi kebutuhan konsumsi. Sedangkan untuk penyediaan energi di Provinsi Jambi

mengalami peningkatan dari 3.232 kkal/kapita/hari tahun 2008 menjadi 3.755 kkal/kapita/hari tahun 2009. Penyediaan energi bahan pangan yang diproduksi daerah mengalami peningkatan sebesar 16,18 %, kecuali penyediaan sayur dan buah, yaitu mengalami penurunan sebesar 10,35 %. Dalam menunjang peningkatan produksi padi didukung oleh sawah beririgasi teknis 1,98%, Setengan Teknis 5,69% dan Sederhana 3,38 dan Desa/Non PU 12,20%. Sedangkan sawah yang berupa tadah hujan masih mencapai 18,91%, pasang surut mencapai 38,75%, sawah rawa lebak mencapai 17,19%.

10. Terhadap pencapaian sub sektor peternakan, pada jumlah populasi ternak besar dan kecil di Provinsi Jambi yaitu telah terjadi peningkatan populasi dari 113.678 ekor tahun 2005 menjadi 164.526 ekor tahun 2009 dengan rataan pertumbuhan pertahun mencapai 9,68 %. Sedangkan untuk kerbau walaupun terjadi kenaikan populasi dari 72.852 ekor tahun 2004 menjadi 73.852 tahun 2009 atau naik 0,34% pertahun, namun kenaikan ini belum terlalu signifikan karena rata-rata pemeliharaan kerbau di Provinsi Jambi masih bersifat sangat tradisional dan banyak kerbau yang disentuh dengan program *Artificial Insemination* (AI) atau kawin suntik untuk mempercepat tingkat kelahiran. Sedangkan populasi kuda terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 472 ekor tahun 2005 menjadi 178 ekor tahun 2009 atau turun -21,64% per tahun. Untuk populasi Kambing dan Domba terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 124.955 ekor untuk Kambing tahun 2004 menjadi 262.072 ekor tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan 20,34% pertahun sedangkan untuk Domba dari 45.285

ekor Domba tahun 2005 menjadi 56.168 ekor tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan 5,53% per tahun. Sedangkan untuk babi peningkatan populasi juga terjadi dari 13.614 ekor tahun 2005 menjadi 19.360 ekor tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan 9,20% pertahun. Sementara itu, pada populasi Itik dan Ayam Kampung serta ayam Pedaging dan Petelur juga terjadi peningkatan populasi rata-rata per tahun yang mencapai 5,12% untuk Itik, 8,91% untuk Ayam kampung, 2,39% untuk ayam pedaging dan 2,55% untuk ayam petelur.

11. Melihat kondisi dan kebutuhan di Provinsi Jambi, ke depan sangat berpotensi untuk pengembangan ternak besar. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan kapasitas daya tampung terlihat untuk limbah tanaman pangan dapat menampung 245.795,54 satuan ternak (ST) dan dengan memanfaatkan limbah kelapa sawit seperti daun, pelepah, lumpur serat bkl sawit dapat menampung 987.356 satuan Ternak (ST) sehingga secara keseluruhan dapat menampung sebanyak 1.233.151,54 satuan ternak. Sedangkan untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dari jumlah ternak besar yang berpeluang dapat ditampung dapat dihasilkan kotoran ternak sebanyak 12.331,5 ton per hari atau 4.500.997,5 ton/tahun yang dapat dikembalikan dalam bentuk pupuk ke tanaman.
12. Sumberdaya kelautan Provinsi Jambi yang terdiri dari pesisir, dan lautan serta biota di dalamnya mempunyai peranan penting bagi pembangunan di daerah baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan dan ekologis. Perikanan merupakan salah satu penyumbang dalam menunjang ekspor non-migas dengan bersumber dari perikanan laut,



perairan umum dan budidaya (budidaya kolam, budidaya keramba/KJA, budidaya tambak dan budidaya mina padi). Dari ketiga sumber produksi tersebut, pada Tahun 2006 telah menghasilkan 56.321,82 ton, dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada Tahun 2007 jumlah produksi yang dihasilkan adalah 66.518,85 ton, Tahun 2008 70.728,20 ton dan pada Tahun 2009 menghasilkan sebesar 75.946,00 ton. Secara rata-rata, dalam kurun waktu tersebut produksi ikan yang berasal dari perikanan laut adalah sebanyak 42.656,15 ton, perairan umum 5.588,25 ton dan yang berasal dari budidaya sebanyak 19.134,32 ton. bahwa produksi ikan yang bersumber dari perikanan laut masih memberikan kontribusi terbesar untuk kurun waktu 2006 – 2009, dimana secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 63,73 %. Sementara kontribusi produksi yang dihasilkan dari budidaya sebesar 27,94 % dan yang berasal dari perairan umum sebesar 8,33 %. untuk budidaya kolam mampu menghasilkan produksi ikan sebanyak 8.607,8 ton, budidaya keramba (KJA) sebanyak 8.901,5 ton, budidaya tambak sebesar 1.616,8 ton dan budidaya mina padi sebesar 8,3 ton. Secara total, dari empat sumber budidaya tersebut menghasilkan produksi ikan sebesar 19.134,3 ton.

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka

air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Dampak perubahan iklim global pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan energi yang jika tidak diantisipasi akan memperburuk kinerja pembangunan khususnya sektor sumberdaya alam. Melalui pelaksanaan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) di Bali Tahun 2007, merupakan momentum yang telah di support oleh beberapa LSM lokal, yang memberikan peluang bagi kelompok masyarakat untuk melindungi hutan adat, hutan desa di wilayah barat dan ada REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) dengan luas sekitar 48.000 hektar di wilayah Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Batanghari.

### **2.1.3. Wilayah rawan Bencana**

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana yaitu :

#### **2.1.3.1. Bencana geologi**

Bencana Geologi di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Berdasarkan data yang sangat terbatas dari penelitian-penelitian, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu:

#### **A. Daerah Bahaya**

Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, bom vulkanik yang membara (rnatikan). Jika

kegiatan gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 6 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lernbah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut.

#### **B. Daerah Waspada**

Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa lapili (kerikil vulkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan. Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 9 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-lembah tersebut.

##### ***2.1.3.2. Bencana banjir***

Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan.

##### ***2.1.3.3. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan***

Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan yaitu tahun 2006 mencapai 6.752 titik api, tahun 2007 berkurang menjadi 2.782 titik api dan tahun 2008 sebanyak 2020 titik api. Untuk angka terakhir pada tahun 2009 sebesar 1.784 titik api, dengan wilayah yang terbesar terjadinya titik api berada di Kabupaten Tebo sebanyak 419 titik, Sarolangun sebanyak 398 dan

Kabupaten Bungo sebanyak 270 titik serta Tanjung Jabung Barat 118 titik. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

#### **2.1.4. Demografi**

Menurut data BPS (2009), bahwa penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 berjumlah 3.088.618 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 60 jiwa/km<sup>2</sup> kecuali Kota Jambi sebesar 2.293 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kota Sungai Penuh sebesar 199 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi selama periode 2005-2010 rata-rata mencapai 1,59% pertahun, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2006 dan 2007 yaitu 2,20%. Namun pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,68% dari tahun 2009. Berdasarkan jenis kelamin, meskipun angkanya berfluktuasi namun selama tahun 2005-2010 rasio penduduk berjenis kelamin laki-laki selalu lebih besar dari kelompok penduduk berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2010 penduduk laki-laki berjumlah 1.578.338 dan perempuan berjumlah 1.510.280 jiwa atau rasio sebesar 1,04 banding 1. Dari jumlah penduduk di Provinsi Jambi, terdapat tiga daerah dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2010 yaitu Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Merangin. Sedangkan tiga daerah dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kota Sungai Penuh 81.789 jiwa, Kabupaten Tanjab Timur 204.557 jiwa dan Kabupaten Kerinci 229.387 jiwa. Penurunan jumlah penduduk Kabupaten Kerinci yang disebabkan oleh terbentuknya Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru sejak 8 Nopember 2008. Adapun jumlah penduduk berdasarkan

pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2010 meliputi :

1. Kota Jambi dengan jumlah penduduk sebesar 529.118 Jiwa
2. Kabupaten Batang hari dengan jumlah penduduk sebesar 240.743 Jiwa
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah penduduk sebesar 204.557 Jiwa
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penduduk sebesar 278.937 Jiwa
5. Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah penduduk sebesar 341.588 Jiwa
6. Kabupaten Tebo dengan jumlah penduduk sebesar 298.043 Jiwa
7. Kabupaten Bungo dengan jumlah penduduk sebesar 302.558 Jiwa
8. Kabupaten Sarolangun dengan jumlah penduduk sebesar 245.848 Jiwa
9. Kabupaten Merangin dengan jumlah penduduk sebesar 336.050 Jiwa
10. Kabupaten Kerinci dengan jumlah penduduk sebesar 229.387 Jiwa
11. Kota Sungai Penuh dengan jumlah penduduk sebesar 81.789 Jiwa

## **2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

### **2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Secara umum, gambaran terhadap kondisi ekonomi makro Provinsi Jambi adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga dapat dicerminkan sebagai berikut :

1. Perekonomian Provinsi Jambi yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 mencapai Rp.42.816 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2009 sebesar Rp.16.272 milyar.
2. Pertumbuhan ekonomi Jambi melambat sebagai dampak dari lesunya perekonomian global yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2009 menurun dari 7,16 persen tahun 2008 menjadi 6,38 persen tahun 2009. Provinsi Jambi sebagai daerah yang masih mengandalkan ekonominya kepada sektor primer ikut terkena imbas dari penurunan harga komoditi di pasar internasional
3. Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, terutama terkait dengan terjaganya daya beli masyarakat, kegiatan kampanye Pemilukada juga ikut mendorong meningkatnya pengeluaran masyarakat dan pemerintah, disamping itu kendala yang masih dijumpai setiap tahun adalah lambatnya penyerapan anggaran, sehingga perlu upaya mempercepat penyerapan anggaran untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Secara bertahap indikator ekonomi Provinsi Jambi menguat, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, serta aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis kepada komoditi primer mulai kembali bergairah yang disebabkan adanya perbaikan untuk hasil pertanian
5. Untuk pertumbuhan tahunan (*year on year*), ekonomi Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 6,17 persen pada tahun 2009. Sumber pertumbuhan berasal dari sektor pertanian sebesar 2,0 persen, sektor perdagangan,

hotel dan restoran sebesar 1,3 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 0,7 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 0,5 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,9 persen serta sektor jasa-jasa sebesar 0,5 persen sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih hanya menyumbang sebesar 0,1 persen.

6. Dari sisi permintaan berdasarkan PDRB Penggunaan, pertumbuhan ekonomi Jambi pada triwulan II-2010 didorong oleh peningkatan konsumsi lembaga nir laba, konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah, terutama dipicu oleh penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (PILKADA) Gubernur Jambi pada bulan Juni 2010 dan juga peningkatan impor karena kebutuhan Pilkada seperti kain, plastik baleho dan sebagainya, serta memasuki liburan sekolah dan persiapan memasuki bulan Suci Ramadhan.
7. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 7,0 persen, konsumsi lembaga nir laba sebesar 3,8 persen, impor sebesar 5,2 persen dan konsumsi rumah tangga sebesar 0,5 persen. Namun dari sisi distribusi, Konsumsi rumah tangga masih mempunyai pangsa yang paling besar, yakni mencapai 63,2 persen, diikuti oleh pengeluaran pemerintah sebesar 17,09 persen, impor sebesar 48,4 persen dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 17,1 persen.
8. Perkembangan PDRB sektor pertanian berdasarkan harga konstan terlihat terjadi peningkatan dari 3.643,6 Miliar pada tahun 2004 menjadi 4.998,7 Miliar tahun 2009 dengan pertumbuhan rata-rata 6,63% pertahun. Perkembangan ini diikuti oleh sub sektor tanaman pangan dari 1.394,2 Milliar

tahun 2004 menjadi 1.864,1 Miliar tahun 2009 dengan pertumbuhan dibawah rata-rata sektor pertanian yakni 5,98% pertahun. Sedangkan sub sektor perkebunan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat di atas rata-rata sektor pertanian dari 1.516,5 Miliar tahun 2004 menjadi 2.351,7 Miliar tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,17 % pertahun. Sedangkan subsektor peternakan terlihat perkembangan yang belum berarti dari 286,8 Miliar pada tahun 2004 menjadi 317, 7 Miliar pada tahun 2009 dengan pertumbuhan di bawah rata-rata pertumbuhan sektor pertanian yaitu hanya 2,06% pertahun. Selanjutnya, terhadap kondisi kehutanan juga terjadi penurunan dari 271,9 Miliar tahun 2004 menjadi 264,3 Miliar tahun 2009 dengan pertumbuhan rata-rata -0,57% pertahun. Kemudian perkembangan untuk sub sektor perikanan terlihat perkembangan dari 174, 1 Miliar tahun 2004 menjadi 200,8 Miliar pada tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan di bawah sektor pertumbuhan yaitu 2,9% pertahun. Pada subsektor perkebunan terlihat terjadi peningkatan PDRB rill cukup signifikan dari 2.186,1 Miliar tahun 2004 menjadi 5.228,6 Miliar tahun 2009. Seiring dengan ini terjadi juga peningkatan kontribusi sektor ini dari 41,13% tahun 2004 menjadi 46,07% tahun 2009.

9. Upaya mengurangi ketimpangan pembangunan pada wilayah perbatasan dan kawasan erat kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan antar golongan masyarakat. Pada tahun 2005 kesenjangan antar golongan masyarakat di Provinsi Jambi yang digambarkan oleh Gini Ratio sebesar 0,302, namun pada tahun 2009 tingkat kesenjangan tersebut menurun dengan Gini Ratio



sebesar 0,269 sehingga termasuk kategori tingkat kesenjangan ringan. Menurunnya kesenjangan antar golongan masyarakat ini, disumbangkan oleh program yang berkaitan langsung dengan masyarakat bawah seperti replanting karet, subsidi bibit sawit untuk petani dan program lain seperti penyediaan kerambah dan lain-lain. Namun disisi lain ketimpangan pembangunan antarwilayah relatif meningkat yang ditandai dengan angka Indeks Williamson yaitu dari 0,393 tahun 2005 meningkat menjadi 0,4137 tahun 2009. Kesenjangan pembangunan ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan otonomi daerah di Provinsi Jambi. Untuk itu, pengurangan penduduk miskin, selain merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, untuk meningkatkan hak dan martabatnya, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan adalah melalui perbaikan kemampuan si miskin, sehingga akan membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi setiap tingkatan ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemerataan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan antar individu.

### **2.2.2. Kesejahteraan Sosial**

Pembangunan pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan, akan sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dimana secara implisit terkandung makna pentingnya memperhatikan aspek kualitas penduduk, SDA dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Kenyataan telah menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas penduduk yang hanya bertumpu pada penekanan pertumbuhan

penduduk, tidak dapat memberikan makna yang cukup berarti dalam pemecahan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, penekanan pada pembangunan pendidikan dengan memperhatikan potensi penduduk serta kondisi SDA dan lingkungan yang ada, ternyata mampu mewujudkan keberlangsungan serta kesinambungan (*sustained*) pembangunan. Isu pembangunan pendidikan berwawasan kependudukan menjadi penting artinya, karena memiliki makna bahwa pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan penduduk dan potensi sumberdaya setempat. Dengan kata lain, pengaruh mutu SDM penduduk merupakan modal (*Human Capital*) penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat antara lain tingkat pendidikan, status kesehatan dan kesempatan kerja. Adapun gambaran umum mengenai aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, dari 71 di tahun 2005 meningkat menjadi 72,45 pada tahun 2009.
- 2) Angka harapan hidup masyarakat Jambi yang mencapai 68,95 tahun berada diatas angka harapan hidup nasional yang hanya mencapai 68,5 tahun.
- 3) Angka melek huruf dapat dijadikan sebagai salah satu indikator taraf pendidikan masyarakat Jambi. Angka melek huruf masyarakat Jambi cukup tinggi yaitu mencapai 96,06 persen pada tahun 2009.
- 4) Rata-rata lama sekolah penduduk Jambi yaitu 7,68 tahun pada tahun 2009. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Jambi masih berpendidikan rendah.

- 5) APM PAUD tahun 2005 mencapai 18,93 meningkat menjadi 58,43 % pada tahun 2009, atau rata-rata pertumbuhan sebesar 32,5 %, sedangkan pada APM SD/MI/Paket A pada tahun 2005 mencapai 86,36 % meningkat menjadi 99,5 pada tahun 2009.
- 6) APK SMP/MTs/Paket B mencapai 79,45 % pada tahun 2005, meningkat menjadi 98,00% pada tahun 2009, dan APK SMA/SMK/MA/SL B/Paket C mencapai 56,89 % pada tahun 2005 meningkat menjadi 72,98 % pada tahun 2009.
- 7) Buta Aksara > 15 tahun mencapai 1,81 % dan pada tahun 2009 dapat ditangani.
- 8) Persentase rata-rata kematian bayi waktu proses persalinan masih cukup tinggi yaitu hanya 0,57% atau 57 bayi meninggal dari 1000 persalinan. Angka kematian tertinggi terjadi di Kabupaten Merangin sebesar 1,46% diikuti oleh Bungo sedangkan angka kematian bayi waktu persalinan yang paling kecil terjadi di kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kota Jambi. Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan pada waktu proses persalinan perlu mendapat perhatian. Data menunjukkan bahwa untuk provinsi di Sumatera, persalinan dengan bantuan dukuk tradisional masih cukup tinggi yaitu mencapai 20,49% dan Jambi termasuk provinsi dengan rata-rata persalinan dibantu oleh dukun tradisional yang paling tinggi di Sumatera.
- 9) Walaupun demikian terjadi penurunan jumlah angka Kematian Bayi (AKB) dari 41 per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan SDKI tahun 2002 menjadi 29,90 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. AKB cenderung menurun

sebagai dampak dari hasil pembangunan program kesehatan yang sangat insentif dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Jambi.

- 10) Keberhasilan penurunan AKB tidak terlepas dari rangkaian program pangan dan perbaikan gizi, kondisi gizi balita secara umum mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya prevalensi kurang gizi. Pada tahun 2005, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita sebesar 9,9 % dan menurun menjadi 8,6 % pada tahun 2009. Upaya perbaikan status gizi masyarakat terutama masyarakat miskin akan terus dilakukan dan menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan. Begitupula kasus gizi buruk yang terdata pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi juga mengalami penurunan dari 2,05 % pada tahun 2005 menjadi 1,8 % pada tahun 2009.
- 11) Status dan kecenderungan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan berdasarkan survei SDKI tahun 2003 adalah 219,8 per 100.000 Kelahiran hidup. Kecenderungan Angka Kematian Ibu (AKI) secara konsisten digunakan angka proyeksi dari tahun 2000 sampai tahun 2001. Sedangkan pada tahun 2004 Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jambi adalah 215,8 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Nasional hasil SDKI pada tahun 2002/2003 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup, ini berarti Provinsi Jambi masih dibawah angka Nasional.
- 12) Peran Pemerintah Kabupaten/Kota adalah untuk dapat menggerakkan penyelenggaraan promosi kesehatan di Kabupaten/Kota dengan melakukan penelitian/pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian berbagai bentuk kegiatan promosi kesehatan sesuai

keadaan di daerah kabupaten/kota, meliputi kegiatan advokasi, bina suasana, penggerakkan masyarakat, serta menjalin hubungan kemitraan lintas program dan sektor di daerahnya, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan swasta.

### **2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga**

Provinsi Jambi terdiri dari beragam kelompok etnik yang memiliki khazanah budaya yang sangat kaya dengan keanekaragaman seni dan budaya serta tradisi daerah. Adapun beberapa gambaran umum yang berkaitan dengan aspek seni budaya dan olahraga adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengembangan wisata, menunjukkan terjadi peningkatan wisatawan manca negara menjadi 7.572 orang pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 1,05 persen dari tahun sebelumnya. Namun jumlah wisatawan nusantara meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 11,14 persen menjadi 861.540 orang pada tahun 2009.
2. Kenaikan wisatawan ini mendorong tumbuhnya hotel berbintang di Provinsi Jambi sebesar 1,29 persen yaitu dari 17 hotel tahun 2008 menjadi 22 hotel berbintang di tahun 2009. Peningkatan wisatawan ini juga mendorong tumbuhnya usaha lain seperti hotel non bintang atau melati sebesar 10,44 persen yaitu menjadi 118 buah, jumlah restoran meningkat menjadi 42 buah atau terjadi peningkatan sebesar 11,35 persen dari tahun sebelumnya, rumah makan meningkat sebesar 10,12 persen menjadi 415 buah. Demikian juga dengan biro perjalanan wisata yang meningkat sebesar 11,08 persen menjadi 51 biro perjalanan.

3. Mayoritas penduduk Jambi sebesar 94,98 persen beragama Islam, kemudian Katolik sebesar 2,29 persen, Protestan dan Buddha sebesar 1 persen, Hindu 0,5 persen dan Konghucu 0,07 persen.
4. Jumlah rumah peribadatan untuk Masjid sebanyak 3.178 buah, Musholla 1.737, Langgar 3.639 ; Vihara 4 buah ; Gereja 312 buah, Pura 4 buah dan Klenteng berjumlah 24 buah.
5. Provinsi Jambi juga pada tahun 2009 mencanangkan Program Ayo Membaca, dengan tujuan untuk meningkatkan budaya baca pada masyarakatnya. Hal ini terlihat dari peningkatan pengunjung Perpustakaan pada tahun 2009 meningkat sebesar 22,84 persen dari tahun sebelumnya menjadi 101.208 orang. Sementara itu juga terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah koleksi buku di Perpustakaan menjadi 97.861 buah buku atau terjadi peningkatan sebesar 123 persen.
6. Cabang olahraga yang diminati oleh masyarakat Jambi mayoritas adalah cabang olahraga Voli, Badminton dan Sepakbola, hal ini terlihat dari jumlah sarana olahraga yang tersebar di semua kabupaten, yaitu berjumlah 118 sarana olahraga Voli, 110 sarana olahraga Badminton dan 84 sarana olahraga sepakbola, yang diikuti juga dengan cabor Basket berjumlah 79 sarana olahraga dan tenis berjumlah 67.

### **2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

#### **2.3.1. Pelayanan dasar**

Indikator dan capaian pembangunan aspek pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

yang merupakan cerminan dari pemenuhan pelayanan dasar dapat digambarkan dari :

1. Perkembangan angka partisipasi sekolah di Provinsi Jambi terlihat bahwa angka partisipasi sekolah yang cukup tinggi untuk tingkat Sekolah Dasar yang mencapai lebih dari 98,11 persen. Angka ini sedikit menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Menengah Atas. Perkembangan APS terjadi tidak begitu nyata terutama untuk Sekolah Dasar dan SLTP bahkan untuk tingkat SLTP cenderung terjadi penurunan, sementara untuk tingkat SLTA terjadi peningkatan di tahun 2009.
2. Jumlah rasio murid terhadap Guru cukup baik yaitu pada tahun 2009 untuk Sekolah Dasar baik negeri (11,45) maupun swasta (11,08) masih relatif sama. Untuk SD ternyata pada swasta (19,05) lebih tinggi dibanding dengan negeri (14,67). Sementara untuk tingkat SLTP dan SMA untuk negeri masih relatif lebih tinggi dari swasta, sedangkan untuk SMK lebih dominan pada sekolah swasta. Hal ini menjadi indikasi bahwa minat belajar siswa cukup baik tetapi jumlah Guru masih terbatas. Untuk sebaran fasilitas pendidikan usia dini di masing-masing Kabupaten terlihat bahwa Kabupaten Merangin memiliki fasilitas pendidikan usia dini yang lebih baik sementara Kabupaten dengan jumlah fasilitas pendidikan usia dini yang terbatas adalah Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Rasio murid terhadap Guru untuk pendidikan usia dini paling tinggi ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rasio murid terhadap guru cukup tinggi yaitu 17,13.

3. Untuk pendidikan dasar, secara umum Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi memiliki infrastruktur yang relatif merata. Kabupaten Kerinci dan Merangin memiliki jumlah sekolah dan jumlah murid yang cukup baik demikian juga dengan rasio murid terhadap guru yang berkisar 12,42 – 14,72. Angka ini ideal untuk melakukan proses belajar mengajar dengan baik dan kondusif. Beberapa Kabupaten seperti Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Tebo, dan Kota Jambi memiliki rasio murid terhadap guru yang lebih tinggi diatas 16. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecuali perlu penambahan infrastruktur pendidikan, penambahan dan peningkatan kualitas guru juga diperlukan. Apalagi, angka rasio murid terhadap guru ini akan meningkat secara signifikan untuk wilayah-wilayah perdesaan.
4. Kota Jambi dan Kerinci merupakan kota dan Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki jumlah murid SLTP terbanyak sedangkan untuk rasio murid terhadap guru Kota Sungai Penuh dan Merangin memiliki rasio yang paling kecil sementara Tanjung Jabung Barat dan Tebo memiliki rasio tertinggi. Rata-rata rasio murid terhadap guru di Provinsi Jambi untuk tingkat SLTP adalah dalam kondisi ideal yaitu 11,24. Untuk jumlah sekolah Merangin dan Sarolangun dan Muara Jambi merupakan Kabupaten dengan jumlah sekolah terbanyak.
5. Pelaksanaan program ini, telah berhasil meningkatkan APM SD/MI/SDLB dari 86,95 persen pada tahun 2006 menjadi 98,72 persen di tahun 2009. Untuk tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB juga mengalami peningkatan dari 79,45 persen pada tahun 2006 menjadi 96,17 persen pada tahun 2009.



6. Angka putus sekolah setelah menamatkan SD cukup tinggi di Provinsi Jambi. Demikian juga dengan murid yang melanjutkan pendidikan dari SLTP ke SLTA. Angka putus sekolah ini juga diperkuat dengan rata-rata lama sekolah yang hanya 7,63 tahun.
7. Untuk pendidikan menengah, rasio murid dan guru rata-rata sudah cukup baik, rata-rata tingkat Provinsi Jambi mencapai 11,66, tetapi harus diingat bahwa perbandingan yang cukup baik ini ada kemungkinan disebabkan jumlah siswa yang terbatas bukan jumlah guru yang telah mencukupi.
8. Jumlah sekolah, murid dan guru untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Jambi masih sangat terbatas. Sekolah dan murid terbanyak terdapat di Kota Jambi diikuti oleh Kabupaten Kerinci dan Merangin. Rasio murid terhadap guru sudah cukup baik kecuali di Sarolangun terutama untuk SMK Swasta dimana rasionya mencapai 86,80. Penambahan tenaga guru di sekolah-sekolah ini mutlak untuk dilakukan. Kabupaten yang memiliki jumlah sekolah dan murid paling sedikit adalah Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Tebo. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahkan tidak ditemukan sekolah kejuruan yang dikelola oleh swasta. Melihat data tersebut maka Jumlah sekolah kejuruan masih sangat terbatas di Provinsi Jambi apalagi jika mengacu kepada proyeksi ke depan bahwa rasio lulusan SLTA Umum dan Kejuruan adalah 40 : 60.
9. Pendidikan Sekolah Luar Biasa, Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Jumlah guru dan murid sekolah luar biasa (SLB) disajikan pada

Tabel 2.43. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah murid yang bersekolah relatif sedikit. Perlu dilakukan suatu kajian apakah anak dengan keterbatasan tertentu memang tidak cukup banyak di Provinsi Jambi atau yang bersekolah atau disekolahkan memang terbatas sebagai akibat dari keterbatasan fasilitas pendidikan Luar Biasa atau karena faktor lain. Sedangkan untuk jumlah mahasiswa sebanyak 45.230 orang dengan perguruan tinggi sebanyak 25 unit dan tenaga edukatif sebanyak 2.635 orang.

10. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi, dapat dilihat dari status kesehatan serta pola penyakit. Dalam mengukur tingkat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya *usia harapan hidup*, menurunnya *angka kematian bayi*, *Angka kematian ibu* dan *status gizi buruk*. Perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan selama tahun 2005 – 2010 menunjukkan pertumbuhan yang cukup mampu menggambarkan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan secara merata yaitu pada jumlah sebaran baik puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit walaupun masih tergolong kurang, namun dapat memberikan arti positif upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan pelayanan. Secara keseluruhan, saat ini jumlah puskesmas mencapai 167 unit, puskesmas pembantu 596 unit, posyandu sebanyak 2.536 unit. Sedangkan untuk penanganan kesehatan skala besar juga terlihat dari jumlah rumah sakit baik swasta maupun rumah sakit pemerintah sebanyak 21 unit yang menyebar pada

setiap Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Selain itu, juga didukung dengan jumlah apotik sebanyak 180 unit.

11. Jumlah tenaga kesehatan menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, yaitu medis sebanyak 777 orang, perawat/bidan sebanyak 6.027, tenaga farmasi sebanyak 560 orang, Gizi sebanyak 171 orang, sanitasi sebanyak 534 orang, kesmas sebanyak 418 orang, dokter umum sebanyak 560 orang, dokter gigi sebanyak 150 orang, dan dokter spesialis sebanyak 67 orang
12. Jumlah tenaga kesehatan ini masih sangat jauh dari rasio ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 2.834.264 orang

### **2.3.2. Pelayanan Penunjang**

Dalam mendukung aspek pelayanan umum, merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya. Salah satu upaya pemenuhan pelayanan penunjang, antara lain meningkatkan Kondisi ketentraman dan ketertiban, khususnya baik pelanggaran keperdataan dan kepidanaan yang terjadi di Provinsi Jambi cenderung masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya.

Dalam konteks demokrasi lokal, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perkembangan media massa lokal (cetak dan elektronik) yang cenderung meningkat, telah memperkokoh iklim keterbukaan dan demokratisasi sehingga mampu mendorong partisipasi politik masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 yang mencapai 74,8 %. Penggunaan hak-hak politik rakyat juga terlihat partisipasi

masyarakat untuk bergabung dalam kelembagaan politik dan kemasyarakatan, seperti Organisasi kemasyarakatan (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai politik. Perkembangan jumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan (Ormas/OKP) di Provinsi Jambi hingga tahun 2009 tercatat 454 ormas, sedangkan perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berjumlah 405. Dari pemilihan umum legislatif telah menghasilkan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebanyak 45 orang yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 5 perempuan. Partai Demokrat dan PAN memiliki wakil terbanyak yaitu masing-masing 8 orang atau 17,78 %. Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat di kabupaten/kota sebanyak 385 orang.

Kendati demokratisasi terus berkembang, namun belum mampu menunjukkan demokrasi yang berkualitas, hal ini terkait kompleksitas sosial budaya dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum mampu dalam menunjang nilai-nilai sistem demokrasi yang berkualitas. Sejumlah permasalahan yang masih sangat dirasakan diantaranya adalah belum optimalnya fungsi kelembagaan politik; dalam hubungan pemerintah daerah dan masyarakat, peran masyarakat masih lemah dalam menentukan sejumlah kebijakan strategis pembangunan sehingga masih ditemui berbagai disparitas dan ketimpangan diberbagai bidang pembangunan daerah, di sisi lain pemerintah daerah sangat dominan; dan akses masyarakat terhadap informasi dan pemberitaan media massa masih sangat kurang, sehingga tidak jarang terjadi distorsi informasi yang berpihak kepada kelompok yang lebih kuat dan berkuasa.

## 2.4. ASPEK DAYA SAING

### 2.4.1. Kemampuan Ekonomi daerah

Dalam upaya ekonomi makro Provinsi Jambi adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga dapat dicerminkan sebagai berikut :

1. Perdagangan antar daerah dan luar negeri Provinsi Jambi sejak triwulan I-2010 mengalami defisit. Namun pada triwulan II-2010 neraca perdagangan Jambi mencapai surplus, hal ini dicapai karena nilai ekspor Bulan Juni mencapai US\$ 90,59 juta atau naik 6,62 persen dan nilai impor bulan Juni hanya US\$ 14,26 juta atau turun 29,02 persen, sehingga surplus neraca perdagangan Provinsi Jambi bulan Juni 2010 sebesar US\$ 76,33 juta. Dengan demikian secara kumulatif surplus neraca perdagangan Januari-Juni 2010 mencapai US\$ 453,65 Juta (BPS, Agustus 2010).
2. Nilai ekspor Jambi periode Januari-Juni 2010 didominasi oleh karet olahan sebesar US\$ 328,45 juta atau 62,54 persen kemudian pertambangan sebesar US\$ 64,12 juta atau 12,21 persen, sehingga nilai tambah (*added value*) dari komoditi ekspor ini masih relatif rendah. Kondisi ini tentunya berpengaruh rendahnya pada *multiplier effect* dari komoditi ekspor tersebut seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan harga komoditi dan tentunya penerimaan daerah juga berpengaruh.
3. Kemudian dari sisi negara tujuan, ekspor Jambi mayoritas ke negara Singapura sebesar US\$ 149,72 juta atau 28,51 persen, kemudian Malaysia US\$ 67,02 juta atau 12,76

persen dan China sebesar US\$ 63,29 juta atau 12,05 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan ekspor Jambi ke Singapura dan Malaysia cukup tinggi, dan karakteristik dari kedua negara tersebut adalah membeli komoditi primer atau bahan mentah dan sebagian bahan setengah jadi, dan kedua negara tersebut akan mengolahnya kembali untuk di ekspor kembali ke Indonesia termasuk Jambi dalam bentuk barang jadi.

4. Ekspor Jambi sebesar US\$ 405,93 juta atau 77,29 persen melalui Pelabuhan Talang Duku, kemudian US\$ 61,97 juta atau 11,80 persen melalui Pelabuhan Kuala Tungkal dan Pelabuhan Muara Sabak hanya sebesar US\$ 57,26 juta atau 10,90 persen.
5. Selanjutnya bila dilihat dari Impor Jambi menurut kelompok komoditi sampai Juni 2010 didominasi oleh mesin dan alat angkutan sebesar US\$ 38,07 juta atau 53,24 persen, hasil industri lainnya sebesar 18,73 juta atau 26,19 persen dan bahan kimia dan sejenisnya sebesar US\$ 10,23 juta atau 14,31 persen serta bahan makanan dan sejenisnya sebesar US\$ 2,67 juta atau 3,73 persen. Salah satu yang menjadi keprihatinan kita kedepan adalah meningkatnya impor bahan makanan dan sejenisnya yang dapat mengancam permintaan terhadap bahan makanan produk lokal termasuk dari Jambi, karena produk lokal tersebut kalah bersaing dari sisi kualitas dan harga, sehingga konsumen lebih menyukai produk makanan dari impor. Oleh karena dalam mewujudkan Jambi Emas 2015, sektor pertanian harus menjadi basis pengembangan ekonomi rakyat untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditi dari

sektor pertanian tersebut yang padagilirannya dapat meningkat kesejahteraan rakyat.

6. Berdasarkan pangsa impor Provinsi Jambi menurut negara asal utama sampai Juni 2010 didominasi oleh Negara China sebesar US\$ 33,36 juta atau 46,65 juta, Singapura sebesar US\$ 14,20 juta atau 19,86 persen dan Amerika Serikat sebesar US\$ 5,36 juta atau 7,50 persen. Berdasarkan selisih ekspor dan impor tersebut, maka Provinsi Jambi mengalami surplus neraca perdagangan kumulatif bulan Januari-Juni 2010 sebesar US\$ 453,65 juta, sedangkan total surplus bulan Juni 2010 sebesar US\$ 76,33 juta atau 16,82 persen dari total kumulatif Januari-juni 2010, Negara yang memberikan surplus terbesar pada bulan Juni 2010 adalah China sebesar US\$ 14,98 juta atau 19,63 persen, kemudian Jepang sebesar US\$ 11,73 juta atau 25,86 persen, Malaysia sebesar 14,99 persen, Amerika Serikat sebesar US\$ 8,595 juta atau 11,26 persen dan Singapura sebesar US\$ 6,54 juta atau 8,57 persen, negara lain sebesar US\$ 22,94 juta atau 30,05 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Provinsi Jambi terhadap ekspor-impor dari negara China, Singapura, Jepang, Malaysia dan Singapura relatif besar, perlu dilakukan strategi diversifikasi dan strategi pengembangan pasar ekspor komoditi Provinsi Jambi, disamping yang lebih penting tentunya peningkatan nilai tambah dari komoditi ekspor tersebut.
7. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jambi, pada bulan Agustus 2010, Kota Jambi mengalami deflasi sebesar 0,66 persen. Indeks harga konsumen (IHK) Kota Jambi turun dari 125,76 persen pada bulan Juli 2010 menjadi 124,93 pada bulan Agustus 2010. Laju inflasi tahun kelender Kota

Jambi pada bulan Agustus sebesar 6,29 persen, sedangkan laju inflasi tahun ke tahun mencapai 7,92 persen. Inflasi tahun kelender sebesar 6,29 persen terjadi karena adanya kenaikan bahan makanan sebesar 14,71 persen, makanan jadi, minuman rokok dan tembakau sebesar 7,51 persen, perumahan, air listrik, gas dan bahan bakar sebesar 2,63 persen, sandang 1,31 persen, kesehatan 1,69 persen, pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,50 persen dan transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen.

8. Pada bulan September – Oktober 2010 ini, diperkirakan dorongan permintaan secara umum akan lebih kuat karena momentum bulan puasa dan hari raya idul fitri 1431 Hijryah sehingga akan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Provinsi Jambi dalam mendorong tekanan inflasi. Inflasi di kota Jambi pada Tahun 2010 ini diperkirakan mencapai 7 – 8 persen, sehingga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang diprediksi hanya mencapai 6 - 7 persen. Walaupun tingkat inflasi di Kota Jambi diperkirakan masih dibawah satu digit, namun pengendalian terhadap meningkatnya inflasi harus dijadikan prioritas dalam kebijakan stabilisasi, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, khususnya peningkatan produksi komoditas pokok yang selama ini didatangkan dari luar Provinsi Jambi.
10. Sektor riil mulai bergerak namun relatif lambat, hal ini tercermin dari pertumbuhan volume eskpor pada bulan Juni 2010 hanya sebesar 0,79 persen dan nilai ekspor sebesar 6,62 persen. Disisi lain nilai impor tumbuh sebesar 29,02 persen dan volumenya naik sebesar 21,76 persen. Namun



secara keseluruhan neraca perdagangan Provinsi pada bulan Juni 2010 surplus sebesar US\$ 76,33 juta atau naik 17,66 persen dibanding bulan sebelumnya, sehingga kumulatif surplus neraca 453,65 juta.

11. Instrumen yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Proses peningkatan taraf hidup tersebut terutama sekali terfokus pada sektor-sektor yang menjadi andalan perekonomian di Provinsi Jambi. Peranan UMKM dan Koperasi pada sektor industri yang berbasis pertanian memiliki kecenderungan yang lebih tinggi berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi, yaitu dengan angka multiplier rata-rata sebesar 7,55. Ini berarti, bila UMKM dan Koperasi pada sektor industri diberi injeksi sebesar 1 milyar maka output perekonomian Provinsi Jambi akan meningkat sebesar 7,55 milyar.
12. Secara rata-rata selama tahun 2005 – 2009 perkembangan jumlah koperasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 5,29%. Dimana perkembangan jumlah koperasi pada tahun 2007 sebesar 3,25 %, tahun 2008 sebesar 4,08 % dan tahun 2009 sebesar 8,53 %. Sementara perkembangan jumlah koperasi aktif juga cenderung menunjukkan trend yang positif, dimana jika pada tahun 2007 menunjukkan perkembangan negatif 0,24 %, maka untuk tahun 2008 meningkat tajam sebesar 3,13 % dan terus mengalami peningkatan di tahun 2009 sebesar 5,65 %. Sedangkan untuk jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2007 meningkat sebesar 10,00

%, tahun 2008 meningkat sebesar 13,64 % dan pada tahun 2009 meningkat sebesar 7,31 %.

#### **2.4.2. Infrastruktur**

Infrastruktur merupakan salah satu aspek pendukung yang sangat dominan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari kurangnya aksesibilitas transportasi dalam mendukung pengangkutan bahan-bahan kebutuhan pokok, pertanian, pertambangan dan keperluan lainnya antar wilayah. Yang menjadi pijakan dasar dalam melaksanakan pembangunan daerah tentunya dicerminkan pada :

1. Salah satu aspek penunjang dalam penyelenggaraan roda pemerintahan serta penyebaran pembangunan secara merata ke seluruh wilayah adalah tersedianya jaringan jalan yang memadai. Penyelenggaraan infrastruktur transportasi, irigasi dan energi serta kelistrikan sangat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Jambi.
2. Dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan, hingga saat ini juga dilihat dari perkembangan kondisi jalan dan jembatan di Provinsi Jambi masih sangat memprihatinkan. Hingga saat ini panjang jalan Provinsi di Jambi telah mencapai 1.566,68 km dan jalan negara sepanjang 820,40 km. Dari kondisi jalan ini diklasifikasikan pada status kondisi jalan baik sepanjang 921,74 km, jalan sedang sepanjang 926,04 km, jalan rusak 384,05 km, dan jalan rusak berat 155,24 km.
3. Pemanfaatan transportasi sungai dan laut dapat dilihat dari data jumlah barang dan orang yang menggunakan jasa

transportasi tersebut. Dalam tahun 2009 jumlah barang yang dibongkar dan dimuat di Pelabuhan di Provinsi Jambi masing-masing mencapai 861.958 ton dan 4.001.989 ton untuk transportasi barang antar pulau 1.282.100 ton untuk transportasi barang ke luar negeri. Perkembangan penggunaan transportasi angkutan laut di provinsi Jambi terjadi fluktuasi jumlah penumpang yang sangat nyata dari tahun 2007 ke tahun 2009. Pada tahun 2007 jumlah penumpang 30.691 dan di tahun 2008 sedikit mengalami peningkatan menjadi 53.269 orang dan di tahun 2009 mengalami penurunan mencapai 33.175. Data ini menunjukkan bahwa transportasi laut tidak begitu menarik untuk digunakan sejalan dengan peningkatan transportasi udara yang relatif ekonomis. Kondisi ini menjadi tantangan sektor perhubungan sungai dan laut untuk melakukan pembenahan sehingga kembali diminati oleh masyarakat.

4. Jumlah lalu lintas udara dan penumpang yang melalui bandara Sultan Thaha terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah penumpang yang datang dan yang berangkat dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Untuk jumlah penumpang yang datang mengalami peningkatan sebesar 24,65% dan penumpang yang berangkat 22,28%. Sedangkan lalu lintas pesawat mengalami penurunan walaupun tidak begitu besar.
5. Terhadap infrastruktur dalam mendukung sektor pertanian adalah pada sumberdaya air yaitu dengan berfungsinya daerah irigasi seluas 21.701 Ha, jaringan rawa seluas 37.475 ha di seluruh Provinsi Jambi. Selama tahun 2006 – 2009, telah terlaksana rehabilitasi jaringan irigasi untuk kawasan seluas rata-rata 1.694 Ha per tahun,

pembangunan untuk kawasan seluas rata-rata 264 Ha per tahun, serta operasi dan pemeliharaan untuk kawasan seluas rata-rata 5.948 Ha per tahun. Sedangkan rehabilitasi jaringan rawa telah terlaksana rata-rata seluas 10.350 Ha per tahun serta operasi dan pemeliharaan untuk kawasan seluas rata-rata seluas 1.300 Ha. Selain itu, telah dilakukan langkah-langkah antara lain meningkatkan fungsi irigasi; pembatasan alih fungsi lahan terutama pada wilayah hulu; serta menggalakkan konservasi sumberdaya air untuk menjaga ketersediaan air dalam rangka mengamankan ketersediaan pangan serta pengembangan daerah rawa harus diiringi dengan pembangunan sarana transportasi dan sarana penyediaan air bersih sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat

6. Selama tahun 2006 – 2009, telah terlaksana rehabilitasi jaringan irigasi untuk kawasan seluas rata-rata 1.694 Ha/tahun, pembangunan untuk kawasan seluas rata-rata 264 Ha/tahun, serta operasi dan pemeliharaan untuk kawasan seluas rata-rata 5.948 Ha per tahun. Sedangkan rehabilitasi jaringan rawa telah terlaksana rata-rata seluas 10.350 Ha/tahun serta operasi dan pemeliharaan untuk kawasan seluas rata-rata seluas 1.300 Ha. Sedangkan untuk penyediaan air baku telah dibuatkan 5 - 6 buah sumur bor per tahun sehingga pada akhir 2009 telah tersedia 23 buah sumur bor di seluruh Provinsi Jambi.
7. Dalam upaya untuk mengantisipasi kecenderungan terjadinya peningkatan permintaan rumah serta kekumuhan akibat penambahan penduduk, telah dilaksanakan melalui pengembangan sarana dan prasarana permukiman yang

difokuskan pada pembangunan jalan lingkungan dan MCK, dengan tingkat capaian selama 2006 – 2009 : pembangunan jalan lingkungan sebanyak 103.987 m<sup>2</sup> dan sarana Mandi, Cuci, Kakus (MCK) sebanyak 15 unit.

8. Persentase Rumah tinggal yang menggunakan penerangan listrik cukup tinggi di Provinsi Jambi. Data dari tahun 2004 hingga tahun 2008 menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2004, 67,69% dari rumah tinggal telah mendapat penerangan listrik dan ditahun 2008 mencapai 84,39%. Penyediaan air minum ledeng masih mengalami kendala dimana hanya sekitar 17% rumah tinggal yang memiliki fasilitas tersebut. Data menunjukkan tidak adanya pertumbuhan yang berarti dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Demikian juga penyediaan air bersih, hanya sekitar 30% rumah tinggal yang mendapat fasilitas tersebut dan data ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2004 hingga 2008. Untuk rumah tinggal yang memiliki jamban sendiri mengalami peningkatan dari hanya 28,31% di tahun 2004 mencapai 57,54% pada tahun 2008.
9. Kemampuan pelayanan penyediaan air bersih masih sangat terbatas. Kemampuan pelayanan pada tahun 2005 64,32 persen dan mengalami kemajuan yang cukup baik dimana pada tahun 2008 mencapai 71,82 persen. Sedangkan berdasarkan sumber air minum, sekitar 60 persen merupakan air minum yang dimanfaatkan sendiri, sekitar 8 – 20 dimanfaatkan bersama dan sekitar 14 persen tidak memiliki fasilitas sumber air minum
10. Cakupan layanan listrik di Provinsi Jambi pada tahun 2006 telah mencapai 80,40%. Meningkat menjadi 84, 39 % pada

tahun 2009. Sedangkan untuk persentase pengguna listrik serta Ratio Elektrisitas Provinsi Jambi Tahun juga secara bertahap setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga pada tahun 2009 tercapai 76,43%. Selain itu, juga telah tersedia Pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Bungo yang secara keseluruhan berjumlah 8 unit. Selain itu juga dibangun pembangkit listrik tenaga surya telah terpasang sebanyak 11.495 unit.

11. Fasilitas telekomunikasi berupa sambungan telpon yang terpasang di Provinsi Jambi tidak mengalami kemajuan yang nyata dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Bahkan cenderung terjadi penurunan. Jumlah unit satuan sambungan telpon yang telah terpasang di Provinsi Jambi sejak tahun 2005 – 2009 sebanyak 58.019 unit, penurunan ini kecuali disebabkan oleh kemampuan pelayanan telekomunikasi juga disebabkan oleh berkembangnya pemanfaatan telepon genggam yang telah mencapai hingga pedesaan.

### **2.4.3. Iklim Berinvestasi**

Provinsi Jambi dalam menopang aktivitas pembangunannya sangat tergantung pada hasil eksploitasi dan produksi sumberdaya alam yang dimilikinya. Minyak bumi, gas bumi, dan batubara mempunyai peranan besar sebagai sumber energi untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya peluang yang sangat besar dalam pemanfaatan sumberdaya yang secara tidak langsung akan berdampak pada iklim investasi daerah yang antara lain :

1. Pangsa investasi swasta pada triwulan II-2010 tidak banyak mengalami perubahan dibanding dengan periode-periode sebelumnya yakni sebesar 17,20 persen. Namun demikian, kredit investasi selama triwulan II-2010 tumbuh sebesar 13,34 persen dengan nilai mencapai Rp. 222,28 miliar. Kondisi ini meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan dengan pencapaian triwulan I-2010 di mana kredit investasi hanya tumbuh 5,92 persen dengan nilai Rp. 98,94 miliar (Bank Indonesia, 2010).
2. Komoditas energi berperan sebagai sumber penerimaan PDRB Provinsi Jambi yaitu jumlah hasil minyak bumi yang dihasilkan dari Tahun 2004 mencapai 8.995,230 barrel berturut-turut Tahun 2005 sebanyak 9.265.060 barrel, pada Tahun 2006 sebanyak 8.375.790 barrel dan pada Tahun 2007 sebanyak 7.354.710, dan pada Tahun 2009 turun menjadi 6.795.020. Hal yang sama juga terjadi pada produksi gas alam dari 667.465 MMBTU pada Tahun 2000 menjadi hanya 27.020 MMBTU Tahun 2003, dan 8 995,23 MMBTU pada Tahun 2004, sekitar 9 265,06 MMBTU pada Tahun 2005, berturut-turut 8 375,79 MMBTU pada Tahun 2006, 7 354,71 MMBTU pada Tahun 2007 dan 6 795,02 MMBTU Tahun 2008. Sedangkan produksi batubara juga terjadi penurunan dari 60.585 ton Tahun 2000 menjadi hanya tinggal 8.206 ton Tahun 2003. Selanjutnya pada kurun waktu dua tahun terakhir terjadi kenaikan antara tahun Tahun 2007 dan Tahun 2008 terjadi kenaikan produksi sebesar 2.215.496,24 m ton Tahun 2007, dan 4.216.057,27 m ton pada Tahun 2009.
3. Berdasarkan pada inventarisasi data potensi, Provinsi Jambi memiliki potensi sumber energi di beberapa wilayah

kabupaten, seperti pada Gas alam yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur sebesar 178,13 triliun kaki kubik (TCF) terdiri dari 91,17 TCF cadangan terbukti dan 86,69 TCF cadangan potensi.

4. Potensi batubara sebesar 50 miliar ton, daerah penghasil terbesar adalah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Potensi energi panas bumi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi terdapat di sepanjang wilayah Pesisir Pantai Timur dengan tingkat produksi hanya mencapai 807 MW.
6. Energi terbarukan yang meliputi tenaga matahari, angin, biomasa, biogas, dan gambut mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.
7. Energi gheo thermal, micro hydro yang terdapat di wilayah Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun dan Kerinci atau pada wilayah Barat Provinsi Jambi.
8. Wilayah Timur Provinsi Jambi yang diarahkan sebagai wilayah zonasi distribusi yang didukung oleh potensi transportasi laut dan pembangunan pelabuhan.

#### **2.4.4. Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting yang dicerminkan pada :

1. Indikator keberhasilan dari bidang ketenagakerjaan tergambar pada meningkatnya kesempatan kerja dibandingkan dengan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2006 sebesar 1.205.000 orang dan pada tahun



2009 sebesar 1.452.372 orang atau meningkat 20,53%, begitupula dengan angka kesempatan kerja pada Provinsi Jambi pada tahun 2006 sebesar 1.103.000 orang dan pada tahun 2009 sebesar 1.378.372 atau meningkat 24,97%.

2. Pertumbuhan angkatan kerja pertahun relatif berfluktuasi selama periode 2006 – 2010, dimana pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 12,58 persen, sehingga secara rata-rata pertumbuhannya mencapai 4,9 persen pertahun. Demikian juga pertumbuhan kesempatan kerja relative berfluktuasi, dimana pada tahun 2006 hanya sebesar 0,56%, namun tahun 2009 mencapai 12,58%., Secara rata-rata jika digunakan periode tahun 2006 – 2009, maka pertumbuhan kesempatan kerja mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,96% pertahun. Dengan tingkat pertumbuhan kesempatan kerja yang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,96% selama periode 2006 – 2009, membawa konsekuensi pada penurunan angka pengangguran yang cukup signifikan. Tingkat pengangguran pada tahun 2006 sebanyak 94.703 orang, menurun menjadi 74.000 orang di tahun 2009, atau jumlah pengangguran menurun rata-rata sebesar (7,28) persen pertahun.
3. Program pembangunan SDM yang dilakukan di Provinsi Jambi selama ini telah mampu meningkatkan kualitas SDM menjadi semakin baik didasarkan pada Indek Pembangunan Manusia (IPM), dari 71,99 pada tahun 2008 menjadi 72,45 pada tahun 2009.
4. Pada tingkat provinsi, Kota sungai Penuh menempati peringkat paling atas dengan IPM sebesar 76,29 lebih tinggi dari IPM di Kota Jambi yang berada pada peringkat kedua

dengan IPM sebesar 75,47, sementara yang paling rendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan IPM sebesar 70,61. Namun jika dilihat lebih jauh mengenai tingkat pendidikan penduduk khususnya penduduk yang berumur 10 tahun keatas, menunjukkan bahwa secara umum daya saing SDM Provinsi Jambi masih relatif rendah. Penduduk di atas umur 10 tahun yang tidak memiliki ijazah SD dan menamatkan SD/MI yang mencapai 58 persen. Sedangkan yang berpendidikan SLTP/MI 18 persen, SMU/MA/SMK sebanyak 19 persen, sementara yang termasuk dalam jajaran berpendidikan tinggi D1 hingga S.3 hanya 5 persen

5. Kebijakan ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2010 ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 73.904 orang atau 4,45 persen pada tahun 2010 (bulan Februari) menjadi 60.055 orang atau 4,45 persen tahun 2010 (bulan Februari). Demikian juga tingkat kemiskinan perkotaan menurun dari 117.285 orang penduduk miskin atau 12,71 persen menurun menjadi 110.819 orang atau 11,80 persen. Penduduk miskin pedesaan juga menurun dari 132.407 orang tahun 2009 atau 6,88 persen menjadi 130,788 orang atau 6,67 persen tahun 2010, sehingga secara total penduduk miskin Provinsi Jambi menurun dari 249.692 orang atau 8,77 persen di tahun 2009 menjadi 241.607 orang atau 8,34 persen pada tahun 2010 (BPS, 2010). Penurunan kemiskinan ini sebenarnya masih sangat labil dan satu saat dapat cepat berubah, karena tergantung pada garis kemiskinan di perkotaan dan

perdesaan yang nilainya dalam pendapatan perkapita pada tahun 2010 sebesar Rp 216.187,- perbulan.

6. Jika dilihat dari kelompok pendapatan masyarakat yang berada di batas garis kemiskinan tersebut relatif banyak dan ini juga diperkuat oleh indeks kedalam kemiskinan diperkotaan sebesar 1,62 dan secara total sebesar 1,05. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga golongan masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan dan dibawah garis kemiskinan dapat keluar dari zona kemiskinan tersebut secara permanen melalui program pemberdayaan masyarakat miskin.
7. Pelayanan Publik. Hingga saat ini, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan yang salah satunya adalah dengan mengubah *mindset* para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Selain itu juga melalui penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat.
8. Dalam rangka penataan kelembagaan daerah sebagai realisasi dari PP No. 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Perda Provinsi Jambi

Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, Perda Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dan Perda Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Selain kelembagaan daerah, pada tahun 2009 telah dibentuk perda kelembagaan lain melalui Perda Provinsi Jambi Nomor 4 tahun 2009. Berdasarkan Perda ini terdapat empat (4) lembaga daerah baru, terdiri dari: Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika Daerah, Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah, Dan Sekretariat Korpri.

9. Pada posisi tahun 2009 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dalam wilayah Kantor Gubernur Jambi meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit, Sekretariat KPU dan Korpri. Secara keseluruhan aparatur PNS di Provinsi Jambi berjumlah 5.851 orang yang terdiri dari 3.616 orang laki-laki (61,80 persen) dan 2.235 orang perempuan (38,20 persen). Ditinjau dari segi golongan kepangkatan terbagi menjadi; golongan I sebanyak 120 orang (2,05 persen), golongan II sebanyak 1.383 orang (23,64 persen), golongan III sebanyak 3.923 orang (67,05 persen), dan golongan IV 425 (7,26 persen). Secara umum, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil terbanyak adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) 2.485 orang (42,47 persen), disusul Strata 1 (S1) 1.821 orang (31,12 persen), Diploma I-IV 679 orang (11,60 persen), SMTP 369 orang (6,31 persen), Pasca Sarjana (S2) 321 orang (5,49 persen), Sekolah Dasar (SD) 171 orang (2,92

persen), dan Doktor (S3) 5 orang (0,09 persen). Sementara Pengangkatan PNS Formasi Umum Tahun 2006-2009 mencapai 9.935 orang. Dalam rangka peningkatan kemampuan PNS, hingga tahun dari tahun 2005 - 2010 yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Diklat), yaitu Diklat struktural sebanyak 6.938 orang; Diklat Teknis sebanyak 1.125 orang, diklat Fungsional sebanyak 572 orang dan Diklat Manajemen sebanyak 620 orang. Pengembangan budaya hukum dan Penghormatan, Pemajuan, serta Penegakan Hak Asasi Manusia.

10. Pembentukan peraturan daerah hingga tahun 2009 dilakukan melalui upaya mengatasi disharmoni peraturan daerah dengan peraturan pusat. Jumlah pembentukan perda Provinsi Jambi, terdiri dari tahun 2007 sebanyak 9 Perda, tahun 2008 sebanyak 14 Perda dan Tahun 2009 sebanyak 11 Perda. Selain itu pembentukan juga dilakukan melalui evaluasi dan konsultasi peraturan daerah kabupaten/kota dengan pertimbangan antara lain, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, bias gender, tidak berpihak pada kelompok miskin, dan bertentangan dengan HAM. Sejak 2005 hingga Agustus 2010, terdapat sejumlah peraturan daerah kabupaten/kota yang ditolak untuk disahkan dan disarankan untuk disempurkan agar sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Efektifitas peraturan daerah juga ditentukan oleh kelembagaan penegak peraturan

daerah. Selain itu untuk melaksanakan penegakan hukum juga perlu didukung oleh adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga telah mengalami kemajuan meskipun belum cukup memuaskan. Dari hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), diketahui bahwa instansi Pemerintah Provinsi Jambi secara keseluruhan masih belum dapat mencapai taraf optimal. Oleh karena itu masih perlu upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi tersebut.

11. Adanya pendelegasian kewenangan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa penegakan hukum (*rule of law*) merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur daerah berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya memantapkan peran aparatur pemerintahan dalam pembangunan daerah menjadi sangat signifikan. Karena betapa pun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan profesional untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu kepada masyarakat, maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan.
12. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah menunjukkan gejala

peningkatan. Dalam kurun waktu 2006 - 2009 telah memberikan kontribusi nyata dalam bidang pengawasan internal Pemerintah Daerah, Sampai dengan tahun 2009 hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi atas pemeriksaan pada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat 3.661 temuan dengan 4851 rekomendasi, dan telah ditindaklanjuti sebanyak 1.886 temuan, dalam proses sebanyak 419 temuan dan 2.549 yang belum ditindaklanjuti. Selain pemeriksaan yang bersifat reguler, Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan yang bersifat kasus pengaduan, sampai dengan tahun 2009 Inspektorat Provinsi Jambi telah menerima surat pengaduan sebanyak 71 pengaduan dan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 27 pengaduan dengan katagori terbukti sebanyak 11 pengaduan sedangkan sisanya sebanyak 44 surat pengaduan hanya dilakukan koordinasi.

13. Peningkatan integritas birokrasi ditunjukkan pula dari tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dilihat dari opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2007-2009. Meskipun opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tidak mengalami kemajuan, yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (*qualified opinion*), tapi paling tidak tidak terperosok pada level yang lebih rendah Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (*adversed opinion*); Tidak Wajar (TW) (*disclaimer of opinion*). Bahkan hasil tindaklanjut rekomendasi-remokendasi BPK RI sejak tahun 2005 hingga 2009. Dari 386 rekomendasi, 285 sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi atau 73,83 persen, 66 rekomendasi telah

ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi atau 17,10 persen dan 35 belum ditindaklanjuti atau 9,07 persen.